

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP

Author:
Tumija¹, Ghina Sinta²

Affiliation:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Jl. Soekarno Km. 20 Jatinangor Sumedang-Jawa Barat
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Jl. Jenderal Soedirman No. 32 Cilacap

Email:
tumija@ipdn.ac.id; ghinasinta@ipdn.ac.id;

ABSTRACT

The Cilacap Regency Government has a high level of dependence on transfer funds provided by external parties and affects the financial performance of the local government. This study aims to determine and analyze the financial performance of the Cilacap Regency local government for the 2017-2020 fiscal year based on regional financial ratio analysis. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that the financial performance of the Cilacap Regency government was good, judging from the BPK's WTP (Unqualified) response with several points that needed to be addressed. The level of independence of Cilacap Regency is still very low and still depends on transfer funds. The level of effectiveness and efficiency of PAD, Cilacap Regency has been very effective and efficient. The allocation of priority expenditures for operating expenditures and capital expenditures has been adjusted to the regulations. The growth ratio based on local revenue, transfer income, and regional expenditure experienced fluctuating growth. Researchers suggest that the government needs to pay attention in detail to potential sources of revenue, collect data and determine tax subjects and objects on a regular basis, as well as provide training and socialization.

Keywords: Ratio Analysis, Local Government, Financial Performance

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan pihak eksternal dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap masih sangat rendah dan masih bergantung pada dana transfer. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien. Alokasi prioritas belanja untuk belanja operasi dan belanja modal sudah disesuaikan dengan aturan. Rasio pertumbuhan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sarannya pemerintah perlu memperhatikan

secara detail sumber potensi penerimaan, melakukan pendataan dan penetapan subjek dan objek pajak secara berkala, serta memberikan pelatihan dan sosialisasi.

Kata Kunci : Analisis Rasio, Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dan mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diamati dari kemandirian daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan (Susanto, 2019:82). (Sumber : <https://distribusi.unram.ac.id>) diakses pada hari Senin, 29 Agustus 2021 pukul 19.10 WIB.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu berupa rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *debt service coverage ratio*, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kabupaten Cilacap adalah salah satu dari tiga daerah industri utama di Jawa Tengah selain Semarang dan Surakarta, sehingga menggambarkan Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan yang bersumber dari PAD apabila dikelola secara optimal. (Sumber : <http://p2k.itbu.ac.id>) diakses pada hari Minggu, 28 Agustus 2021 pukul 13.15 WIB.

Wilayah yang luas dengan ketersediaan lahan yang luas dapat menarik investor untuk menanamkan modal di Cilacap yang dapat mendukung pengembangan industri berskala nasional. Namun, besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap belum mampu menciptakan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer lebih mendominasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daripada penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja
2017	648.091.381.096	1.874.953.083.082	3.014.110.475.842
2018	527.577.740.281	1.874.260.346.332	2.985.422.839.102
2019	574.276.795.304	1.928.670.863.364	2.779.740.306.711
2020	591.343.787.160	1.757.591.202.654	2.607.739.427.660

Sumber : Diolah penulis (2021) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA Kabupaten Cilacap

Berdasarkan tabel 1 di atas, dana perimbangan pada tahun 2017 sampai 2020 yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat masih mendominasi dalam menutupi belanja daerah dibandingkan pendapatan asli daerah. PAD yang diterima Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari prosentase pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap terhadap total pendapatan daerah, dalam tabel 1.2 berikut ini :

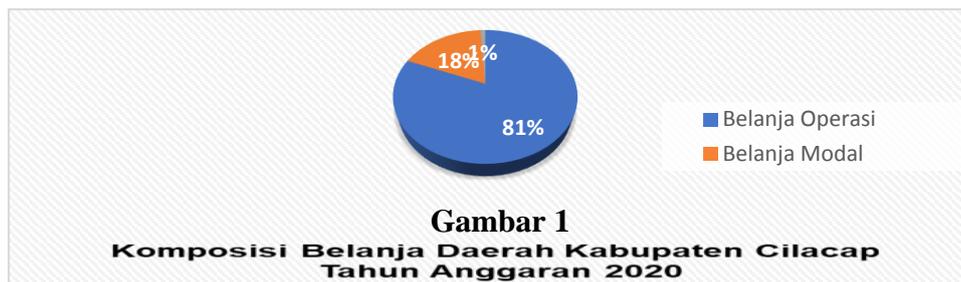
Tabel 2
Kontribusi PAD, Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Total	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah
2017	648.091.381.096	3.067.274.791.140	21,1%
2018	527.577.740.281	3.072.112.464.787	17,2%
2019	574.276.795.304	3.282.797.966.310	17,5%
2020	591.343.787.160	3.152.402.455.712	18,8%

Sumber : Diolah penulis (2021) dari www.djpk.kemenkeu.go.id dan LRA Kabupaten Cilacap

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat ketimpangan penerimaan daerah antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan dan kurang optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber daya yang menggambarkan adanya ketergantungan yang besar kepada dana yang diberikan pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah dan belum melebihi setengah pendapatan daerah. Penggunaan keuangan daerah dalam membiayai pemerintahan perlu dioptimalkan dan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan belanja daerah. Penggunaan keuangan ini diimplementasikan melalui belanja daerah.

Belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi yang lebih mendominasi menggambarkan suatu pemerintah daerah lebih mengutamakan pemenuhan belanja rutin daripada memprioritaskan belanja modal dalam memperhatikan pembangunan daerah. Belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber : Diolah penulis (2021) dari *LRA Kabupaten Cilacap*

Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat dijelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Cilacap lebih besar pada belanja operasi yang sifatnya rutin dan berskala yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja rutin erat kaitannya dengan menghitung rasio keserasian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang mendeskripsikan prioritas pada belanja rutin atau belanja investasi dalam meningkatkan pembangunan.

Melihat data yang tertera pada tabel 1, tabel 2, dan gambar 1 dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah Kabupaten Cilacap, dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Cilacap belum optimal dalam menggali sumber daya daerahnya, memiliki tingkat ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, kontribusi PAD terhadap penerimaan total masih tergolong rendah, dan Pemerintah

Kabupaten Cilacap lebih memfokuskan pada belanja operasi. Diperlukan sinergitas usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan yang optimal dan baik.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, penulis merumuskan penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap pada Tahun Anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah?.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2017-2020 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan, rasio efisiensi belanja, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan yang bersumber dari data APBD

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal yaitu yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri (Abdul Halim, 2017:279). Berikut formula rasio kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	26 - 50	Konsultatif
Sedang	51 - 75	Partisipatif
Tinggi	76 - 100	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2019:140)

Berdasarkan tabel 3, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pola hubungan instruktif, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat besar dan daerah dapat dikatakan tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dalam hal keuangan.
- b) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah perlahan berkurang. Pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk menjalankan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat berperan dalam hal konsultasi.
- c) Pola hubungan partisipatif, peran konsultasi beralih pada peran partisipasi pemerintah pusat, karena suatu daerah sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah dan peran pemerintah pusat terhadap daerah semakin berkurang.
- d) Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat tidak lagi ikut campur tangan dalam pemerintahan daerah karena daerah sudah benar-benar mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dan sudah mendapat keyakinan penuh dalam pelaksanaan otonomi keuangan.

2) Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan daerah untuk merealisasikan PAD sesuai dengan target ditunjukkan oleh rasio efektivitas ini (Abdul Halim, 2017:298). Berikut formula rasio efektivitas:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berikut kriteria efektivitas kinerja keuangan :

Tabel 4
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:141)

3) Rasio Efisiensi PAD

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah tidak cukup apabila hanya dilihat dari tingkat efektivitas kemampuan daerah dalam memenuhi target PAD yang telah ditentukan Berikut formula rasio efisiensi PAD :

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut kriteria efisiensi PAD:

Tabel 5
Kriteria Efisiensi PAD

Persentase (%)	Kriteria
<10	Sangat Efisien
10 – 20	Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
31 – 40	Kurang Efisien
>40	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:142)

4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menunjukkan perbandingan antara belanja operasi atau belanja modal terhadap total belanja daerah. Berikut rumusnya:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

5) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt Service Coverage Ratio atau *DSCR* merupakan rasio dalam mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban yaitu utang. Pemerintah dapat melakukan pinjaman untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan. Pinjaman yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam melunasi dan mengangsurnya. Berikut formula DCSR :

$$\text{DSCR} = \frac{\{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

6) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Abdul Halim, 2017:286). Berikut formulanya:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } X_{n-1}} \times 100\%$$

METODE

Creswell dalam Sugiyono (2019:2) mengemukakan bahwa *“research method involve the form of data collection, analysis, an interpretation that research proposes for the studies”*. Menurut Dokeshire & Jennifer Thurlow dalam Sugiyono (2019: 2) menyatakan *“research is the systematic collection and presentation of information”* yang berarti penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha mendapatkan informasi dan mencari pemahaman berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan/lokasi penelitian untuk dianalisis lebih lanjut dari fenomena yang muncul sehingga gambaran yang jelas dan sistematis diperoleh untuk memecahkan masalah penelitian yang dihadapi

Data yang diperoleh bersumber dari data primer berdasarkan hasil wawancara dan observasi di BPKAD Kabupaten Cilacap. Data sekunder dari berbagai sumber, yaitu dokumen, jurnal, surat kabar, buku, dan peraturan. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan adanya perhitungan rasio keuangan daerah. Penulis melakukan analisis terhadap rasio keuangan daerah yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dengan menggunakan indikator kinerja keuangan daerah berdasarkan teori Abdul Halim dan Mahmudi.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2016-2020 :

Tabel 6
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Kemandirian	Keterangan
2016	428.598.349.897,4 2	2.367.411.994.757,0 0	18,10	instruktif
2017	648.091.381.095,6 9	2.419.183.410.044,0 0	26,79	konsultif
2018	527.577.740.281,4 7	2.544.534.724.506,0 0	20,73	instruktif
2019	574.276.795.303,5 9	2.708.521.171.007,0 0	21,20	instruktif
2020	591.343.787.160,4 8	2.561.058.668.552,0 0	23,09	instruktif
	Rata-rata		21,98	instruktif

Sumber : Data Sekunder diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Cilacap antara tahun 2016 sampai 2020 berada pada posisi instruktif dengan rasio 21,98 persen. Hanya pada tahun 2017, kemandirian keuangan daerah berada pada posisi konsultif dengan presentase sebesar 26,79 persen. Meskipun sudah pada kategori konsultif, tingkat kemandirian di tahun 2017 masih belum jauh berbeda dengan yang berada pada kategori instruktif. Secara keseluruhan, rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dari tahun anggaran 2016 sampai 2020 mengalami naik turun. Tetapi perubahan yang terjadi belum menunjukkan perubahan signifikan yang baik. Perubahan yang terjadi masih dalam kisaran kategori instruktif dan konsultif di tahun 2017.

Kemandirian keuangan daerah yang masih berada di kategori instruktif menandakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Keberadaan tingkat kemandirian pada kategori ini masih sangat jauh dari standarisasi keuangan daerah yang dapat dikatakan mandiri. Kemandirian yang masih sangat rendah disebabkan besarnya suntikan dana yang dari pihak luar dibandingkan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu

sendiri. Kurangnya kontribusi PAD dalam pendapatan asli daerah ini perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam rangka menggali sumber PAD secara optimal.

2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan suatu perhitungan yang dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kemampuan pencapaian target PAD yang telah ditentukan. Berikut merupakan hasil perhitungan di atas dengan dilengkapi keterangan yang berisi tingkat efektifitas sudah masuk efektif atau belum :

Tabel 7
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas	Keterangan
2016	428.598.349.897,4 2	387.045.051.000,0 0	110,74	sangat efektif
2017	648.091.381.095,6 9	612.077.977.866,0 0	105,88	sangat efektif
2018	527.577.740.281,4 7	497.353.613.147,0 0	106,08	sangat efektif
2019	574.276.795.303,5 9	553.906.636.361,0 0	103,68	sangat efektif
2020	591.343.787.160,4 8	561.113.709.065,0 0	105,39	sangat efektif
	Rata-rata		106,35	sangat efektif

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan perhitungan data yang dicantumkan dalam tabel 7, dapat dilihat prosentase efektifitas PAD Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun anggaran 2016 sampai 2020 mendapat rata-rata 106,35 % dengan kategori sangat efektif dan pada tiap tahunnya tingkat efektivitas berada pada posisi di atas 100% atau sama dengan 1 (satu). Tahun 2016 merupakan prosentase tertinggi selama 5 tahun anggaran dengan prosentase sebesar 110,74%. Jika dilihat dari besarnya target dan realisasi PAD tahun 2016, besarnya target dan realisasi tidak sebesar target dan realisasi tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2017 tingkat efektifitas PAD menurun dengan prosentase 105,88% tetapi masih dalam kategori sangat efektif. Jika diperhatikan, target dan realisasi PAD tahun 2017 lebih besar dari keempat target dan realisasi tahun sebelum dan setelahnya. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 106,08%, tetapi belum dapat melebihi efektifitas tahun anggaran 2016. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 103,68% dan meningkat lagi di tahun 2020 sebesar 106,35%.

Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 Kabupaten Cilacap secara keseluruhan sudah bisa dikatakan sangat efektif dengan jumlah prosentase melebihi 100% atau 1 (satu). Besarnya prosentase tahun 2016 dengan jumlah target dan realisasi yang tidaksebanyak tahun setelahnya menggambarkan bahwa upaya dan usaha pemerintah dalam pencapaian realisasi sangat mempengaruhi tingkat efektivitas PAD.

3) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD menggambarkan perbandingan dari realisasi biaya yang dikeluarkan dalam proses pencapaian realisasi PAD dengan jumlah realisasi PAD itu sendiri. Berikut Rasio efisiensi pendapatan asli daerah dilihat dari pajak dan retribusi Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2016 sampai 2020 :

Tabel 8

Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016-2020

Total Biaya Pemerolehan	Total Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
6.552.949.077,00	168.899.799.022,00	3,88	Sangat Efisien
6.977.256.095,00	188.827.746.756,00	3,70	Sangat Efisien
7.934.478.062,00	229.429.930.107,00	3,46	Sangat Efisien
9.658.781.287,00	254.216.126.294,00	3,80	Sangat Efisien
4.472.662.193,00	222.088.436.390,00	2,01	Sangat Efisien
Rata-Rata		3,37	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 8 rasio efisiensi tersebut, dapat dikatakan rasio efisiensi keuangan daerah dilihat dari pajak dan retribusi daerah masuk ke dalam kategori sangat efisien sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi. Tiap tahunnya, rasio efisiensi mengalami naik turun. Tahun 2017, prosentase rasio efisiensi menurun menjadi 3,70 % dari prosentase awal di tahun 2016 3,88%. Tahun 2018 prosentase menurun lagi menjadi 3,46%. Sedangkan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi 3,80% melebihi tahun 2018 dan 2017. Dan pada tahun 2020, prosentasi kembali menurun menjadi 2,01% turun sebesar 1,79% dari tahun 2019.

Tingkat efisiensi tertinggi antara tahun 2016 sampai 2020 terjadi di tahun 2020, meskipun biaya perolehan dan realisasi kecil. Semakin kecil nilai prosentase rasio efisiensi, semakin tinggi tingkat efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya guna pencapai target. Prosentase terbesar rasio efisiensi Kabupaten Cilacap terdapat pada tahun 2016 sebesar 3,88% yang menandakan bahwa jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, tahun 2016 masih kurang efisien.

Realisasi pendapatan yang tinggi perlu diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan optimal dan tidak berlebihan.

4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian yang digunakan dalam penelitian terhadap keuangan daerah Kabupaten Cilacap yaitu perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi terhadap total belanja daerah. Hasil dari perhitungan ini dapat memberikan informasi seberapa besar porsi yang dialokasikan pemerintah untuk belanja operasi.

Berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio belanja operasi daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 9
Rasio Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio BO
2016	2.304.600.214.823,00	3.150.325.840.872,00	73,15
2017	2.360.680.782.998,01	3.014.110.475.842,01	78,32
2018	2.434.551.928.596,00	2.985.422.839.102,00	81,55
2019	2.116.419.108.705,00	2.779.740.306.711,20	76,14
2020	2.118.332.170.798,00	2.607.739.427.660,00	81,23
Rata-Rata			78,08

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 9 di atas, hasil rasio keserasian belanja operasi mengalami kondisi fluktuasi atau naik turun. Prosentase tahun 2017 dan 2018 meningkat setiap tahunnya. Dimulai tahun 2016 jumlah prosentase sebesar 73,15 %, naik 5,17% menjadi 78,32% di tahun 2017. Kemudian naik lagi dari tahun 2016 dan 2017 sebesar 81,55%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,41% menjadi 76,14% dihitung dari tahun 2018. Tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 81,23%. Rata-rata rasio keserasian belanja operasi daerah yaitu sebesar 78,08%, yang mana dapat dikatakan belanja operasi yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai keseharian pemerintahan tiap tahunnya.

Belanja daerah Kabupaten Cilacap yang dikeluarkan untuk operasional pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun dihitung dari tahun 2016, besarnya melebihi setengah dari belanja daerah yaitu lebih dari 50%. Hal ini menyatakan bahwasanya biaya operasional pemerintah daerah Kabupaten Cilacap cukup besar tiap tahunnya dan sudah sesuai dengan teori Mahmudi yang pada umumnya belanja

operasi berada pada kisaran 60-90%. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Selanjutnya perhitungan rasio keserasian untuk belanja modal pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dilihat berikut ini :

Tabel 10
Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Cilacap TA 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio BM
2016	843.986.253.460,00	3.150.325.840.872,00	26,79
2017	650.976.458.792,00	3.014.110.475.842,01	21,60
2018	550.840.750.506,00	2.985.422.839.102,00	18,45
2019	663.321.198.006,20	2.779.740.306.711,20	23,86
2020	462.431.933.784,00	2.607.739.427.660,00	17,73
Rata-Rata			21,69

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 10 tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio keserasian untuk belanja modal pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016 samapai dengan tahun 2020 di atas 20% yaitu sebesar 21,69%. Tahun 2016 merupaka tingkat keserasian rasio dibanding lima tahun tersebut. Tahun 2017 turun sebesar 5,19% dari 26,79% menjadi 21,60%. Tahun berikutnya yaitu tahun 2018 turun kembali menjadi di bawah 20% yaitu sebesar 18,45%. Rasio keserasian belanja modal naik kembali ditahun 2019 sebesar 5,41% dari tahun 2018, tetapi turun kembali di tahun 2020 menjadi 17,73% dibawah 20%. Melihat perhitungan rasio ini, Kabupaten Cilacap dalam mengalokasikan dananya untuk belanja modal mengalami fluktuasi, yaitu perkembangan naik turun.

Mahmudi menyatakan bahwsanya proporsi umum untuk belanja modal yaitu sebesar 5-20%. Kabupaten Cilacap sudah berada pada posisi ini dan bahkan beberapa tahun memiliki rasio keserasian belanja modal lebih dari 20%

5) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt Service Coverage Ratio atau dikenal dengan DSCR merupakan rasio perhitungan yang membandingkan penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib (BW) dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Beriku adalah penerimaan DBH, DBHDR, DAU dan Pengeluaran Wajib Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2016-2020 :

Tabel 11
Jumlah DBH, DBHDR, DAU Dan Pengeluaran Wajib Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016-2020

TAHUN	DBH	DBHDR	DAU	BELANJA WAJIB PEGAWAI
2016	243.741.687.403,00	160.150.323,00	1.384.695.514.000,00	1.310.353.598.633,00
2017	280.129.962.366,00	1.595.165.839,00	1.360.370.867.000,00	1.177.551.828.965,00
2018	273.505.007.108,00	489.907.419,00	1.362.443.518.000,00	1.172.462.907.533,00
2019	284.156.095.148,00	0,00	1.423.200.397.000,00	1.193.972.479.225,00
2020	115.972.540.726,00	317.257.920,00	1.281.940.170.000,00	1.145.443.814.425,00

Sumber : LRA Kabupaten Cilacap, 2022

Berdasarkan tabel 11 tersebut, penerimaan DBH dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami naik turun. Paling kecil DBH yang diterima dari 5 tahun tersebut yaitu di tahun 2020. Tahun 2019, Kabupaten Cilacap tidak menerima DBHDR sehingga nilainya berjumlah nol rupiah. Penerimaan DBHDR terbesar diterima ditahun 2017 sebesar 1.595.165.839 rupiah. Penerimaan DBHDR 2017 telah melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar 442.790.000 rupiah. Penerimaan DAU mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2019 merupakan penerimaan DAU paling besar pada kurun waktu 5 tahun sebesar 1.423.200.397.000 rupiah. Pengeluaran belanja untuk belanja wajib yaitu belanja pegawai rata-rata mengalami penurunan, kecuali yang terjadi pada tahun 2019 belanja wajib naik menjadi 1.193.972.479.225 rupiah

6) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer

Rasio pertumbuhan pendapatan transfer digunakan untuk mengukur besarnya pertumbuhan dana yang diterima pemerintah daerah dari pihak eksternal yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain yang dalam keuangan daerah kabupaten bisa berkaitan dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten lain.

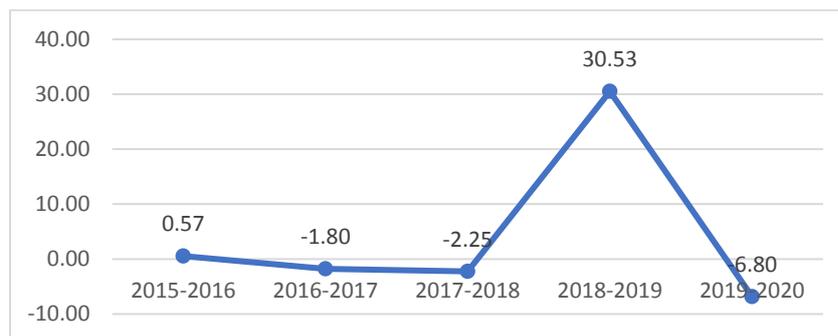
Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dana transfer Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2015-2020 ditampilkan dalam tabel 12 berikut ini :

Tabel 12
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun	Transfer t_0	Transfer t_1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	1.997.861.978.187,00	2.009.215.450.885,00	0,57
2016-2017	2.009.215.450.885,00	1.973.052.856.082,00	-1,80
2017-2018	1.973.052.856.082,00	1.928.606.984.854,00	-2,25
2018-2019	1.928.606.984.854,00	2.517.433.595.490,00	30,53
2019-2020	2.517.433.595.490,00	2.346.223.145.232,00	-6,80

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat dilihat pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Cilacap tahun Anggaran 2015-2016 bernilai 0,57% dan menurun di tahun 2016-2017 menjadi bernilai negative sebesar -1,80%. Tahun berikutnya mengalami penurunan lagi menjadi -2,25% dan meningkat secara drastis di tahun 2018-2019 menjadi 30,53%. Kembali menurun bernilai negative di tahun 2019-2020 menjadi -6,80%. Secara lebih jelas dapat dilihat berdasarkan gambar 3 berikut ini :



Gambar 3
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2015-2020

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan gambar 3 di atas, terlihat secara jelas pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2015 sampai 2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif atau naik. Pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun anggaran 2017 sampai 2020. Tahun anggaran 2017-2018 menandakan berada di titik negatif dan kemudian melonjak naik di tahun anggaran 2018-2019 sebesar 30% lebih. Akan tetapi, di tahun berikutnya merosot langsung menjadi bernilai negative. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap belum stabil dalam mengelola keuangannya. Tingginya rasio pertumbuhan pendapatan transfer daerah justru menandakan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masih sangat tinggi. Sebaliknya, rendahnya rasio pertumbuhan pendapatan transfer menunjukkan keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi dengan menekan aliran tranfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain.

7) Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

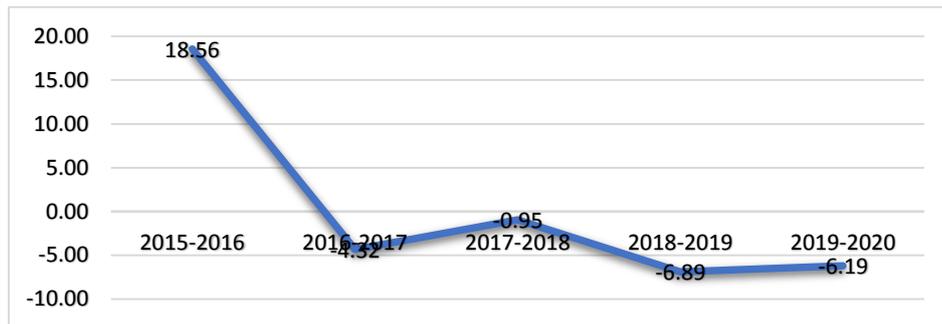
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Cilacap tersebut ditampilkan dalam tabel 13 berikut :

Tabel 13
Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja Daerah t_0	Belanja Daerah t_1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	2.657.124.478.070,00	3.150.325.840.872,00	18,56
2016-2017	3.150.325.840.872,00	3.014.110.475.842,01	-4,32
2017-2018	3.014.110.475.842,01	2.985.422.839.102,00	-0,95
2018-2019	2.985.422.839.102,00	2.779.740.306.711,20	-6,89
2019-2020	2.779.740.306.711,20	2.607.739.427.660,00	-6,19

Sumber : Data diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 13, pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif atau naik turun. Rasio tertinggi berada pada tahun 2015-2016 dengan belanja daerah tahun 2016 merupakan belanja tertinggi selama 6 tahun anggaran. Selain tahun 2015-2016, seluruh titik pertumbuhan berada pada posisi negative. meskipun besarnya naik turun. Pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 4
Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2015-2020

Sumber : Data Diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan gambar 4 tersebut, terlihat secara jelas penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2015-2016 menuju 2016-2017. Penurunan terjadi lebih dari 20%. Hal ini menerangkan bahwa belanja daerah tahun 2015 jauh lebih kecil dari 2016. Belanja tahun 2016 lebih besar dibandingkan tahun 2017, sehingga hasil perhitungan bernilai negative.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2016-2020. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dari tahun 2017-2020 telah mendapat tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan beberapa poin yang harus diperbaiki terutama dalam hal penatausahaan asset. Jika dilihat dari rasio keuangan daerah, terdapat beberapa poin yang memang masih perlu diperbaiki terutama dalam tingkat ketergantungan terhadap dana transfer. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2016 sampai 2020 masih tergolong sangat rendah atau masih sangat tergantung pada aliran dana transfer. Tingkat pencapaian realisasi terhadap target PAD sudah sangat efektif dan mampu mencapai target yang telah ditentukan bahkan lebih. Tingkat efisiensi dalam pengeluaran biaya dalam mewujudkan realisasi sudah bisa dikatakan sangat efisien, karena realisasi yang diterima besar dengan pengeluaran yang sesuai. Dilihat dari rasio keserasian, pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja operasi. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak memiliki pinjaman jangka panjang sejak 2014. Apabila dilihat dari rasio

pertumbuhan, keuangan daerah mengalami perubahan yang fluktuatif dengan perbedaan yang cukup signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. S. K. (2017a). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- _____. (2017b). *Teori, Konsep, dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- _____. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Marja Sinurat. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah (Cetakan 1)*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- _____. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Sutopo (ed.); Cetakan ke). Alfabeta.
- _____. (2019b). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). In *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Susanto, H. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- <http://p2k.itbu.ac.id>. *Kabupaten Cilacap Ensiklopedia Dunia*. Minggu, 28 Agustus 2021.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. *Anggaran dan Realisasi*. Minggu, 28 Agustus 2021.
- <https://ppid.cilacapkab.go.id>. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten*. Minggu, 28 Agustus 2021